

KONSTRUKSI CITRA KAUM BANGSAWAN: SEBUAH STUDI KOMUNIKASI POLITIK PADA BANGSAWAN KERATON CIREBON

Ficky Utomo

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma, fickytutomo191@gmail.com

Jl. Margonda Raya 100, Depok Jawa Barat, Indonesia 16424

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Kota Cirebon, dengan objek penelitian politisi dari kalangan bangsawan Keraton Kasepuhan dan Kanoman Cirebon. Peneliti ingin mengetahui tujuan mereka berpolitik, pencitraan, serta komunikasi politik yang mereka lakukan. Terakhir, peneliti ingin mengetahui pendapat *opinion leader* dalam hal ini Ketua Kecamatan Lemah Wungkuk dan Pejabat Kelurahan Kasepuhan Cirebon tentang politisi dari kalangan bangsawan keraton. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tradisi fenomenologi. Proses dan teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam, dengan mewawancarai 6 narasumber terpercaya yang terkait langsung dengan fenomena yang peneliti angkat Berdasarkan penelitian ini, hasil yang didapatkan adalah, kaum bangsawan Keraton Kasepuhan dan Kanoman melakukan pencitraan dengan menggunakan simbol kenengratan keraton, dan masyarakat pemilih tradisional masih terpengaruh dengan pencitraan politik mereka. Mereka melakukan gerakan politik, dan mengintensifkan komunikasi politik kepada masyarakat dengan tujuan untuk mengembalikan hak-hak berkuasanya wargi dalem keraton dan hak-hak keraton yang lainnya seperti tanah, pajak dan lain-lainnya ketika nanti mereka berkuasa. Gerakan-gerakan berpolitik para bangsawan ini, dilakukan agar kepentingan-kepentingan keraton dan sultan dapat terwakili oleh wargi-wargi keraton kepercayaan sultan yang beliau perintahkan untuk berpolitik mewakili sultan untuk sementara waktu. Saran dari hasil penelitian untuk para politisi dari kalangan bangsawan agar mempersiapkan segalanya sebelum berpolitik, jangan hanya mengandalkan kebangsawanannya, dan untuk masyarakat agar bisa lebih cerdas dan kritis dalam memilih calon pemimpinnya.

Kata Kunci: Citra; Interkasi Simbolis; Komunikasi Politik; Fenomenologi; Bangsawan.

ABSTRACT

This research was conducted in the city of Cirebon, with the object of research by noble politicians from the Kasepuhan Palace and Kanoman Cirebon. Researchers want to know their goals in politics, imaging, and political communication that they do. Finally, the researcher wanted to find out the opinion of the opinion leader in this case the Chairperson of the Lemah Wungkuk Subdistrict and the Kasepuhan Urban Village Officer Cirebon about politicians from the royal court. This study uses qualitative methods with a phenomenological tradition approach. The process and techniques of data collection, researchers used in-depth interviewing techniques, by interviewing 6 trusted sources directly related to the phenomena that researchers adopted. Based on this research, the results obtained were that the nobility of the Kasepuhan Palace and Kanoman conducted an image using the royal palace and community symbols. Traditional voters are still affected by their political image. They carry out political movements, and intensify political communication with the community with the aim of restoring the power of authority of the palace palace and other court rights such as land, taxes and others when they come to power. Political movements of these nobles were carried out so that the interests of the palace and sultan could be represented by the wargi-wargi sultan's palace of palace which he ordered to politically represent the sultan for a while. Suggestions from the results of research for noble politicians to prepare everything before going to politics, do not just rely on their nobility, and for society to be more intelligent and critical in choosing candidates for leadership.

Keywords: Image; Symbolic Interaction; Political Communication; Phenomenology; Nobility.

PENDAHULUAN

Kota Cirebon dipilih sebagai tempat melakukan penelitian karena peneliti menemukan banyak sekali keunikan dan kekhasan dibandingkan kota-kota lainnya di Indonesia. Baik dari segi budaya, wisata, bahasa, kuliner, bahkan dalam dunia politiknya. Peneliti ingin mengetahui keunikan-keunikan dan kekhasan yang diciptakan oleh para politisi Kota dan Kabupaten Cirebon ini, khususnya bangsawan-bangsawan atau kaum priyayi warga dalem Keraton Kasepuhan dan Kanoman yang menjadi objek penelitian dalam karya Penulisan Ilmiah ini. Hal yang diteliti antara lain manuver-manuver politik mereka, komunikasi politik, dan pencitraan yang mereka ciptakan, serta tanggapan masyarakat berpendidikan tinggi dalam hal ini *opinion leader* dan masyarakat pemilih tradisional. Komunikasi politik merupakan proses penyebaran, makna atau pesan yang bersangkutan dengan fungsi suatu sistem politik (Plano dalam Mulyana, 2008). Dalam komunikasi politik terdapat adagium bahwa, “politik adalah pembicaraan” (Suwardi dalam Mulyana, 2008). Dari sinilah peneliti berkeinginan untuk mengetahui pesan-pesan politik yang disampaikan secara khas oleh para politisi dari kalangan bangsawan keraton Cirebon. Bagaimana mereka menyampaikannya, lalu simbol apa yang memberikan mereka kekuatan dan kepercayaan diri untuk maju ke dalam kancah perpolitikan daerah.

Penyampaian makna komunikasi politik pastilah berkaitan dengan pencitraan, dan komunikator politik. Pencitraan merupakan proses pembentukan citra melalui informasi yang diterima oleh khalayak secara langsung atau melalui media sosial dan media massa. Hal itu berkaitan dengan persepsi seseorang terhadap pesan yang menyentuhnya atau merangsangnya. Citra yang melekat di benak seseorang itu dapat berbeda dengan realitas objektif atau tidak selamanya merefleksikan kenyataan yang sesungguhnya. Demikian juga citra dapat merefleksikan hal yang tidak wujud atau imajinasi yang mungkin tidak sama dengan realitas empiris. Citra memiliki 4 (empat) fase, keempat fase tersebut ialah; (1) representasi dimana citra merupakan cermin suatu realitas; (2) ideologi di mana citra menyembunyikan atau memberikan gambaran yang salah akan realitas; (3) citra menyembunyikan bahwa tidak ada realitas; dan (4) citra tidak memiliki sama sekali hubungan dengan realitas apapun (Baudrillard dalam Arifin, 2011:1993). Politisi sebagai komunikator politik memainkan peran sosial yang utama, terutama dalam proses pembentukan citra (pencitraan) dan opini publik (Nimmo dalam Mulyana, 2008:30). Politisi atau politikus berkomunikasi sebagai wakil suatu kelompok dan pesan-pesan politikus itu adalah untuk mengajukan dan atau melindungi tujuan kepentingan politik. Artinya, komunikator politik mewakili kepentingan kelompok, sehingga jika dirangkum maka politikus mencari pengaruh lewat komunikasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan tradisi fenomenologi dan dengan pendekatan fenomenologi. Menurut Bodgan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu kebutuhan (Bodgan dan Taylor dalam Moleong, 2006). Sementara fenomenologi sesungguhnya adalah sebuah pendekatan yang diharapkan mampu mengungkapkan sedetail mungkin objek yang dikaji dan aspek-aspek lain yang tidak mungkin dihitung dengan matematika. Dalam studi ini, adalah penting untuk menyerap dan mengungkapkan kembali perasaan dan pemikiran di balik tindakan (Mulyana, 2008). Sementara tradisi fenomenologi adalah: *“where as a biography reports the life a single individual, a phenomenological study describes the meaning of the lived experiences for several individuals about a concept or the phenomenon”* (Creswell dalam Mulyana, 2008:91). Studi dengan pendekatan fenomenologi dengan demikian, berupaya menjelaskan makna pengalaman hidup sejumlah orang tentang suatu konsep atau gejala. Fenomenologi tidak berasumsi bahwa peneliti mengetahui arti sesuatu bagi orang-orang yang sedang diteliti oleh mereka. Inkuiri fenomenologis memulai dengan diam. Diam merupakan tindakan untuk menangkap pengertian sesuatu yang sedang diteliti. Mereka berusaha untuk masuk ke dalam dunia konseptual para subjek yang ditelitinya sedemikian rupa sehingga mereka mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh mereka di sekitar peristiwa dalam kehidupan sehari-hari (Moleong dalam Mulyana, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Cirebon adalah sebuah kota dan kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. kota dan kabupaten ini berada di pesisir utara Pulau Jawa atau yang dikenal dengan Jalur Pantura yang menghubungkan Jakarta-Cirebon-Semarang-Surabaya. Cirebon berasal dari kata caruban yang berarti campuran atau cai dan rebon yang berarti air udang dalam versi lain. Sejak terbentuk dari asal mula katanya saja kita sudah bisa membuat hipotesa, bahwa daerah ini merupakan tempat pertemuan masyarakat dari beragam jenis latar belakang suku, budaya, ras, dan agama. Percampuran budaya dari Jawa, Sunda, Arab, dan Cina pun kental kita rasakan di kota dan kabupaten ini. Relief-relief atau keramik-keramik serta desain cagar-cagar budaya seperti Keraton dan lain-lain pun kental dengan aroma percampuran budaya Jawa, Sunda, Arab, dan Cina. Budaya Jawa ada karena Cirebon merupakan tempat bertemu atau bermusyawarahnya para penyebar agama islam di tanah Jawa, yang dinamakan Walisongo. Delapan dari sembilan

wali adalah ulama yang menyebarkan nilai-nilai ke-Islaman di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Mereka inilah yang mewarnai keberagaman budaya di tanah Cirebon dengan warna Jawanya. Sedangkan budaya Sunda masuk ke dalam Cirebon lebih dahulu, karena pendiri pertama tanah Cirebon, Pangeran Walangsungsang adalah Putra Mahkota Kerajaan Padjajaran. Budaya Arab masuk ke dalam daerah ini karena sultan pertama sekaligus juga salah satu dari sembilan Walisongo, yakni Syaikh Syarif Hidayatullah/Sunan Gunung Jati adalah Putra Mahkota Sultan Mesir yang masih keturunan Bani Hasyim (Keluarga Nabi SAW). Budaya Cina masuk ke dalam Cirebon, adalah karena salah satu istri dari Sunan Gunung Jati adalah putri dari Kerajaan di Cina, yakni Putri Ong Tien. Menurut manuskrip Purwaka Caruban Nagari, pada abad 15 di Pantai Laut Jawa ada sebuah desa nelayan kecil bernama Muara Jati. Pada waktu itu sudah banyak kapal asing yang datang untuk berniaga dengan penduduk setempat. pengurus pelabuhan adalah Ki Gedeng Alang-Alang yang ditunjuk oleh penguasa Kerajaan Galuh (Padjajaran). Di pelabuhan ini juga terlihat aktivitas Islam semakin berkembang. Ki Gedeng Alang-Alang memindahkan tempat pemukiman ke tempat pemukiman baru di Lemahwungkuk, 5 km arah selatan mendekati kaki bukit menuju Kerajaan Galuh. Sebagai kepala pemukiman baru diangkatlah Ki Gedeng Alang-Alang dengan gelar Kuwu Cerbon. Pada Perkembangan selanjutnya, Pangeran Walangsungsang, putra Prabu Siliwangi ditunjuk sebagai Adipati Cirebon dengan Gelar Cakrabumi/Cakrabuana.

Pangeran inilah yang mendirikan Kerajaan Cirebon, diawali dengan tidak mengirimkan upeti kepada Raja Galuh. Oleh karena itu Raja Galuh mengirimkan bala tentara ke Cirebon Untuk menundukkan Adipati Cirebon, namun ternyata Adipati Cirebon terlalu kuat bagi Raja Galuh sehingga ia keluar sebagai pemenang. Dengan demikian berdirilah kerajaan baru di Cirebon dengan Raja bergelar Cakrabuana. Berdirinya Kerajaan Cirebon menandai diawalnya Kerajaan Islam Cirebon (Kesultanan Cirebon) dengan pelabuhan Muara Jati yang aktivitasnya berkembang sampai kawasan Asia Tenggara dan dipimpin oleh sultan pertamanya Maulana Syaikh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang merupakan Keponakan dari Raden Walangsungsang/Pangeran Cakrabuana. Pada tanggal 7 Januari 1681 Cirebon secara politik dan ekonomi berada dalam pengawasan pihak VOC, setelah penguasa Cirebon waktu itu menanda tangani perjanjian dengan VOC. Pada masa kolonial pemerintah Hindia Belanda, tahun 1906 Cirebon disahkan menjadi Gemeente Cheribon. Ditandai pula sebelumnya dengan pecahnya Kesultanan Cirebon menjadi 3, yakni Kasepuhan, Kanoman, dan Kacirebonan lewat politik Belanda.

Kemudian pada tahun 1942, Kota Cirebon diperluas dan tahun 1957 status pemerintahannya menjadi Kotapraja. Kemudian pada tahun 1965 ditetapkanlah Cirebon menjadi

Kotamadya. Sejak di masuki politik VOC Belanda, sistem pemerintahan yang semula berada di bawah komando keraton, telah di alihkan menjadi sebuah kota madya dan kabupaten. Mulai pada masa itulah raja-raja Cirebon kehilangan hak kuasa, dan hak politiknya. Sehingga mereka pun berusaha kembali untuk merebut sesuatu yang mereka sebut sebagai hak milik warga dalem keraton. Kekuasaan terhadap ekonomi, politik, sosial, dan lain sebagainya inilah yang coba mereka kembali raih seperti dahulu ketika pusat pemerintahan dan politik serta ekonomi adalah kerajaan. Lalu siapakah dari mereka warga dalem keraton yang bisa disebut sebagai bangsawan atau Priyayi? Menurut R.EB. Haryanto, dan R.EB.M. Agung Amir, mereka yang disebut sebagai bangsawan atau priyayi di dalam tubuh Keraton Kasepuhan, Kanoman, dan Kacirebonan, adalah mereka yang mempunyai gelar: (1) Sultan (Sultan Anom, Sepuh, dan Panembahan); (2) Pangeran (Elang Agung, atau Elang Raja); (3) Raden Elang Bagus; (4) Ratu Raja; (5) Ratu, dan (6) Raden.

Lalu bagaimana membedakan trah dari gelar-gelar tersebut. Dalam prinsipnya mereka semua sama, yakni orang-orang yang mewarisi darah Sunan Gunung Jati. Tetapi gelar Sultan, Pangeran, dan Ratu Raja adalah mereka yang masih tinggal di dalam lingkup keraton, dan mengurus kehidupan dan penghidupan di dalam area keraton. Sementara para Raden Elang dan Ratu ada yang masih tinggal di dalam keraton, namun banyak pula yang sudah keluar dari keraton dan memilih untuk tinggal di luar keraton. Raden Elang dan Ratu adalah gelar untuk mereka yang mempunyai garis nasab dari laki-laki (ayahnya adalah keturunan Sultan dan Pangeran), sementara Raden adalah mereka yang mempunyai garis nasab dari Ibu (Ibunya seorang Ratu namun ayahnya masyarakat biasa). Namun banyak pula Raden-Raden di luar keraton, yang sebenarnya mereka juga adalah Raden Elang. Namun karena leluhur mereka (Para Pangeran), pergi dari keraton lalu berdakwah di luar kerajaan, akhirnya keturunan mereka tidaklah akrab dengan keraton. Seperti ulama-ulama pendiri beberapa pesantren di Cirebon dan Pulau Jawa yang masih trah Sunan Gunung Jati, mereka sebenarnya adalah Raden Elang.

Bangsawan-bangsawan keraton inilah yang masih mempunyai pengaruh yang cukup kuat di tengah masyarakat asli Cirebon dan warga tradisional sekitar Keraton menurut Gusti Sultan Sepuh XIV PRA. Arief Natadiningrat, SE., di sebuah perbincangan hangat dalam wawancara. Lalu mengapa sebahagian dari mereka berpolitik? Jawabannya adalah untuk menunjukkan eksistensi mereka. politik Belanda yang membuat Cirebon menjadi kota madya menjadikan mati fungsi keraton dalam pemerintahan daerah. Berbeda dengan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dipimpin oleh seorang Sultan yang juga sekaligus Gubernur Yogyakarta. Sehingga Keraton masih memiliki taring yang sangar dalam kancah perpolitikan daerah. Berulang kali dalam wawancara bersama Drs.R.EB. Subagja, sang Elang selalu mengulang daerah Yogyakarta sebagai perbandingan daerah yang dahulunya kerajaan lalu

kemudian menjadi provinsi yang dipimpin oleh Rajanya sebagai Gubernur, dan daerah yang tadinya kerajaan, lalu dipimpin oleh orang yang bukan merupakan keturunan raja.

Beliau berkelakar, bahwa daerah yang dipimpin oleh Sultan sekaligus pemegang kuasa pemerintahan (Gubernur, Walikota, Bupati, dll), daerah inilah yang lebih maju dan berkembang ketimbang Cirebon yang tidak dipimpin oleh Sultan sebagai pemimpin politik. Dari semua informasi yang peneliti terima dari kata-kata ini menunjukkan bahwa narasumber dari kalangan bangsawan Keraton Kasepuhan dan Kanoman, secara garis besar masihlah berpikir feodal. Mereka masih menganggap agung anugerah keningratan yang melekat pada diri mereka. Ini seolah-olah membuat mereka lebih cakap dalam hal memimpin ketimbang orang-orang awam, sekalipun orang awam itu berpendidikan tinggi dan berbudi luhur. Secara pandangan komunikasi, caranya yang mengulang-ulang hal yang sama dalam penekanan kepada lawan bicaranya ini, disebut sebagai sugesti, dan sugesti dalam ilmu seni berbicara atau retorika adalah sebagai alat untuk mempengaruhi lawan bicaranya, agar lawan bicaranya berpikir hal yang sama atau menyetujui apa-apa yang dikomunikasikan oleh seorang retor. Retorika adalah sebuah teknik pembujuk-rayuan secara persuasi untuk menghasilkan bujukan dengan melalui karakter pembicara, emosional atau argumen, awalnya Aristoteles mencetuskan dalam sebuah dialog sebelum *The Rhetoric* dengan judul '*Grullos*' atau Plato menulis dalam Gorgias, secara umum ialah seni manipulatif atau teknik persuasi politik yang bersifat transaksional dengan menggunakan lambang untuk mengidentifikasi pembicara dengan pendengar melalui pidato, persuader dan yang dipersuasi saling bekerja sama dalam merumuskan nilai, kepercayaan dan pengharapan mereka.

Di samping sistem sosial, sistem kebudayaan yang dimiliki seorang komunikator juga dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi retorik. Tingkah laku, tata adab dan pandangan hidup yang diwarisinya dari suatu kebudayaan tertentu akan juga mempengaruhi efektivitas dalam proses komunikasi retorik dengan manusia lain. Inilah yang banyak kami tangkap dari sebagian besar narasumber dari golongan priyayi. Yakni proses komunikasi politik yang bersifat retorika sugestif. Faktor Elang Bagja mengulang-ulang pandangannya terhadap Yogya dan Cirebon juga dapat mengidentifikasi sebuah perasaan tidak adil.

Dimana daerah yang satu memiliki kemajuan dalam bidang ekonomi, sosial, dan pariwisata, sedangkan yang satu lagi sedikit tertinggal, dan menurutnya ini karena Yogya sudah mandiri, menjadi provinsi sendiri, sedangkan Cirebon yang notabennya jauh lebih layak menjadi sebuah provinsi ketimbang Banten, malah di dahului Banten. Cirebon seharusnya lebih dahulu menjadi provinsi ketimbang Banten dan Yogya, karena Cirebon ini sebuah kerajaan yang paling tua di tanah Jawa yang masih bertahan. Kedudukan umur kerajaan Cirebon Nagari adalah sama dengan Kerajaan Demak. Majapahit runtuh menjadi Demak, Demak runtuh menjadi Pajang,

Pajang runtuh menjadi Mataram Islam, dan Mataram Islam runtuh menjadi Yogya dan Solo. Sedangkan umur Majapahit itu menurutnya sama dengan umur Padjajaran, dan Cirebon adalah bias pertama dari keruntuhan Kerajaannya Prabu Siliwangi tersebut, dan setelahnya tidak runtuh lagi dan kami masih bertahan sampai sekarang, tuturnya berkelakar. Itulah sebabnya kami ingin berdiri sendiri menjadi sebuah provinsi baru bernama Provinsi Cirebon. Agar kami bisa mandiri dan kami bisa lebih berkembang, tuturnya. Gusti Sultan Sepuh XIV PRA. Arief Natadiningrat, SE., juga mengutarakan hal yang serupa, menurutnya Banten dan Cirebon ini di ibaratkan seperti dua sayap burung merpati yang tadinya lumpuh, lalu banten berdiri menjadi sebuah provinsi, dan daerahnya mulai bangkit, ini berarti Sayap Banten mulai kokoh untuk terbang, sedangkan sayapnya Kota Cirebon masih lemah. Nada yang serupa dan lebih vokal lagi datang dari pendapat Patih Kesultanan Kanoman, Pangeran Anom R.EB. Kamaludin. Ketika kami tanya jika kemudian Cirebon menjadi sebuah Provinsi, setujukah Elang jika nantinya sistemnya disamakan dengan sistem daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan tegasnya dia katakan, iya saya sangat setuju, karena itu adalah haknya wong Cirebon (Orang Cirebon), haknya Sultan Cirebon.

Keningratan Sebagai Cermin Interaksionisme Simbolik

Sultan Pangeran M.Saladin, yang merupakan bangsawan dari Keraton Kanoman Cirebon ketika pencalonannya menjadi Walikota Cirebon beliau menggunakan jargon dalam spanduk-spanduk besarnya di jalanan Kota Madya Cirebon yang bertuliskan, “deklarasi kembali Cirebon sebagai Kota Wali”. Dan beliau selalu menggunakan gelar ‘sultan’ dalam setiap baliho, spanduk, dan lain-lainnya. begitupun dengan pencalonan Ir.H.E.Herman Khoeron, M.si, sebagai caleg DPR pusat daerah pilih Cirebon, dan Indramayu. Dia selalu mencantumkan gelar Elangnya. Serupa pula dengan P. Elang Kusnandar, M.si, Ratu Raja Arimbi, dan kerabat keraton atau bangsawan Keraton Cirebon yang lainnya. Mereka menggunakan ‘simbol keningratan’ sebagai alat pencitraan dalam proses interaksionisme simbolik mereka. Mereka ingin mengesankan bahwa ‘kami ningrat dan kami lebih bijak, cerdas, dan lain sebagainya’. Pertukaran simbol keningratan mereka dengan masyarakat Cirebon inipun diiyakan oleh sejumlah narasumber yang kami wawancarai, diantaranya Sultan Sepuh Arief natadiningrat, Pangeran Anom Kamaludin, Elang Bagja, dan Elang Nurohim. Bahkan Elang Agung Kamaludin dengan lantang menyebut bahwa dengan keningratan dan ‘kemuliaan nasab’ yang mereka bawa, itu menjadi semacam jaminan untuk masyarakat bahwa ketika mereka memilih kami (kaum bangsawan keraton), mereka tidak akan pernah dikecewakan. Karena menurut Elang Kamaludin garis darah kaum bangsawan Cirebon yang bersambung dengan Sayyidul Sultan Panatagama, khalifatullah Kanjeng Syaikh Maulana Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati ini, seperti “memaksa” mereka sedari kecil untuk menta’ati agama dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya luhur bangsa Indonesia. Simbol-simbol keningratan inilah yang dijadikan alat

mereka untuk “tampil sempurna”, dihadapan para masyarakat pemilih Cirebon, khususnya mereka warga asli, warga sekitar keraton, dan para keturunan abdi dalem keraton Cirebon.

Teori interaksi simbolik menggunakan paradigma individu sebagai subjek utama dalam percaturan sosial, meletakkan individu sebagai pelaku aktif dan proaktif. Pada dasarnya teori interaksi simbolik menengahkan soal diri sendiri (*the self*) dengan segala atribut dunia luarnya. Cooley menyebutnya sebagai *looking glass self* (Mulyana, 2001:74). Artinya, setiap interaksi manusia selalu dipenuhi dengan simbol-simbol, baik dalam kehidupan sosial maupun kehidupan diri sendiri. Diri tidak terisolasi, melainkan bersifat sosial. Individu lain adalah ‘cermin’ untuk melihat diri sendiri. Dengan demikian teori interaksi simbolik merupakan cara pandang yang memperlakukan individu sebagai diri sendiri sekaligus diri sosial (Mulyana, 2008:35). Teori ini peneliti ambil sebagai pijakan dalam memahami pencitraan dengan simbol kenengratan yang dilakukan oleh para politisi dari kalangan bangsawan keraton. Teori ini menjadi pembedah fenomena dimana para politisi mencoba “menyempurnakan kesan” khalayak kepada kelompok mereka dengan menggunakan citra bangsawan dan kenengratan. Kaum bangsawan mencoba menangkap keinginan khalayak terhadap “pemimpin impian” masyarakat Kota dan Kabupaten Cirebon, dan mereka menangkap keinginan khalayak itu dengan mencoba memenuhi “impian masyarakat” dengan menampilkan, bahwa “ini loh kami, kami keturunan Kanjeng Sunan Gunung Jati, dan kami bisa memimpin sehebat kakek-kakek kami dahulu dalam memimpin”. Simbol-simbol inilah yang kami tangkap dan inilah alasan mengapa kami menggunakan teori interaksionisme simbolik sebagai pisau bedah untuk membedah bentuk pencitraan politik yang mereka lakukan.

Dramaturgi Dalam Pencitraan Bangsawan Keraton Cirebon

Menurut Pangeran Patih Anom Kamaludin, Kepemimpinan itu dilihatnya sebagai sesuatu yang diturunkan secara genetik atau secara pertalian darah. Di gambarkan olehnya dengan perumpamaan “buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya”. Ketika kakek moyangnya adalah seorang pemimpin besar dan memiliki kebijaksanaan, maka menurutnya cucu-cucunya pun setidaknya menurunkan sifat kakeknya secara genetik. Ketika seorang ayah memegang nilai-nilai luhur dalam proses memimpin, maka anaknyapun akan bersikap sama seperti ayahnya ketika dia memimpin. Hal ini nampaknya sedikit disanggah oleh Sultan Sepuh PRA. Arief Natadiningrat, SE., dan Elang Nurohim, menurut mereka tidak juga hal itu pasti terjadi, bisa saja seorang anak berbeda sifat dengan ayahnya atau dengan kakek-kakek moyangnya, jadi semuanya dikembalikan kepada masing-masing pribadi calon pemimpin tersebut. Tetapi mereka masih mengiyakan bahwa kaum priyayi warga dalem keraton Cirebon, masalah memiliki kharisma yang kuat ditengah-tengah masyarakat, bukan hanya di Cirebon, bahkan tokoh-tokoh nasionalpun masih sangat menghormati bangsawan-bangsawan keraton

Cirebon, tandas Sultan Sepuh ke-XIV tersebut. Dari sikap dan isi pembicaraan mereka, dapat dilihat bahwasannya mereka seperti sedang memainkan peran (berakting), menjadi “sosok raja” yang “sempurna”, dan mempunyai kemampuan dan pengaruh yang luar biasa.

Hal ini membuktikan kebenaran teori dramaturgi, bahwasannya Teori dramaturgis menjelaskan bahwa identitas manusia adalah tidak stabil dan merupakan setiap identitas tersebut merupakan bagian kejiwaan psikologi yang mandiri. Identitas manusia bisa saja berubah-ubah tergantung dari interaksi dengan orang lain. Disinilah dramaturgis masuk, bagaimana kita menguasai interaksi tersebut (Littlejohn, 2009:165). Dalam dramaturgis, interaksi sosial dimaknai sama dengan pertunjukan teater. Manusia adalah aktor yang berusaha untuk menggabungkan karakteristik personal dan tujuan kepada orang lain melalui “pertunjukan dramanya sendiri”. Dalam mencapai tujuannya tersebut, menurut konsep dramaturgis, manusia akan mengembangkan perilaku-perilaku yang mendukung perannya tersebut. Selayaknya pertunjukan drama, seorang aktor drama kehidupan juga harus mempersiapkan kelengkapan pertunjukan. Kelengkapan ini antara lain memperhitungkan *setting*, kostum, penggunaan kata (dialog) dan tindakan non verbal lain, hal ini tentunya bertujuan untuk meninggalkan kesan yang baik pada lawan interaksi dan memuluskan jalan mencapai tujuan. Oleh Goffman, tindakan diatas disebut dalam istilah “*impression management*”.

Perspektif dramaturgis dari Erving Goffman, sebenarnya merupakan salah satu model pendekatan interaksi simbolik selain teori penjumlahan dan etnometodologi (Mulyana, 2001:68). Goffman begitu terilhami oleh teori interaksi simbolik dari George H. Mead yang sering dianggap sebagai Bapak Interaksionisme Simbolik. Menurut Mead : “Cara manusia mengartikan dunia dan dirinya sendiri berkaitan erat dengan masyarakatnya. Mead melihat pikiran (*mind*) dan dirinya (*self*) menjadi bagian dari perilaku manusia yaitu bagian interaksinya dengan orang lain”. Bahkan menurut Mead : “Sebelum seseorang bertindak, ia membayangkan dirinya dalam posisi orang lain dengan harapan-harapan orang lain dan mencoba memahami apa yang diharapkan orang itu”.

Intinya, hanya dengan menyerasikan diri dengan harapan-harapan orang lain, maka interaksi menjadi mungkin. Semakin mampu seseorang mengambil alih, atau membatinkan perasaan-perasaan sosial semakin terbentuk identitas atau kediriannya. Karena itulah lewat pendekatannya terhadap interaksi sosial, Goffman sering dianggap sebagai salah satu penafsir ‘teori diri’ dari Mead dengan menekankan sifat simbolik dari manusia (Mulyana, 2001:106). Goffman sering dianggap ahli teori yang sangat memperhatikan analisis interaksi manusia. Ia menganggap individu (bukan struktur yang lebih besar) sbagai satuan analisis. Untuk menjelaskan tindakan manusia, Goffman memakai analogi drama dan teater. Hal itulah yang menjadikannya sebagai seorang dramaturgis. Melalui karyanya yang berjudul *The Presentation*

of Self in Everyday Life (1959) Goffman menyediakan dasar teori mengenai bagaimana individu tampil di dunia sosial. Kerangka ini terus dipakai Goffman dalam banyak karya lain yang dihasilkannya. Dalam hal ini sultan dan para bangsawan mencoba untuk mengerti betul keinginan masyarakat Cirebon, yang menginginkan sejarah kejayaan Nagari Caruban terulang kembali dimasa kini, dan para bangsawan ini mencoba untuk berakting sesempurna mungkin sebagai para “satria pandhita” yang bisa membawa Cirebon kembali ke masa kejayaan seperti di masa kesultanan dahulu. Inilah alasan mengapa kami menggunakan teori dramaturgi sebagai landasan kami dalam membedah pencitraan politik para kaum bangsawan Cirebon.

Lalu di dalam wawancara dan jamuan tersebut, Sultan juga mengatakan “Saya pernah duduk di kursi DPD, dan yang duduk disana itu adalah orang-orang pilihan rakyat, ketika itu Dapil saya adalah Jawa Barat, dan saya adalah orang dengan pemilih terbanyak nomer dua di Jawa Barat. Yang pertama itu adalah Pak Ginanjar (Baca : Ginanjar Kartasasmita), dan yang kedua itu saya. Saya tidak memegang organisasi atau partai apapun saja bisa rangking dua, bahkan Tokoh-tokoh Bandungpun banyak yang bingung dan kelimpungan, jadi bisa disimpulkan sendiri oleh kalian”. Hal ini menunjukkan pengaruh wargi dalem keraton (dalam hal ini Sultan), di dalam pandangan masyarakat. Komunikasi yang berlandaskan kebudayaan ini secara tidak langsung membenarkan, atau sama dengan penelitian Afrina Sari, beliau menulis penelitian tentang “Komunikasi Politik Dan Diplomasi Berbasis Kearifan Lokal (Analisis Pilkada Dalam Proses Kampanye Politik)”. Hasil penelitiannya : PILKADA Gubernur/Bupati/walikota dapat dimenangkan dengan menggunakan strategi komunikasi politik dengan diplomasi berbasis kearifan lokal. Bentuk diplomasi seorang kandidat dapat muncul dengan melakukan negosiasi saat kampanye politik dengan masyarakat (Sari, 2012:18).

Sedikit sama juga dengan hasil penelitian dari Loisa & Setyanto yang menuliskan penelitian berjudul, “Mencari Bentuk Kampanye Politik Khas Indonesia : Pencitraan Berbasis Dimensi Budaya”. Hasil penelitiannya: Berdasarkan analisis terhadap nilai-nilai budaya dominan yang tersirat di dalam artikel di surat kabar, dapat disimpulkan bahwa di dalam kampanye kandidat, perlu membangun pencitraan berdasarkan nilai-nilai budaya (Loisa & Setyanto, 2012). Serupa pula dengan penelitian Jebarus, dengan judul penelitian, “Komunikasi Politik Soekarno: Membangun Dukungan Publik Dengan Pendekatan Budaya”. Hasil penelitiannya: Sebagai seorang aktivis politik, Soekarno mampu menunjukkan bagaimana upaya untuk mendapatkan dukungan publik melalui strategi komunikasi politik. Ia menggunakan pendekatan budaya sebagai media penyampaian pesan. Yang lebih penting, “panggung” itu menjadi media untuk mendekatkan dirinya dengan rakyat serta masyarakat lokal. Rakyat dari berbagai kalangan melihat dan merasakan langsung apa yang menjadi gagasan dan visi Soekarno untuk perbaikan hidup mereka. Selain itu, interaksinya dengan realitas sosial memungkinkan ia

memiliki kemampuan yang cemerlang untuk menyusun serta mensosialisasikan gagasan-gagasan besar yang berpengaruh secara nasional maupun internasional. Gagasan-gagasan itu dikemudian hari dalam perjalanannya sebagai penguasa politik didengungkan sebagai pesan penting ke tengah masyarakat (Jebarus, 2011).

Serta serupa pula dengan penelitian dari Wardhani, dengan judul penelitian, “Komunikasi Pemerintahan Daerah Berbasis Kearifan Lokal”. Hasil penelitiannya: Komunikasi pemerintahan hendaknya dapat menyesuaikan dengan perkembangan pemerintahan yang saat ini berubah, dari *government* (penyelenggaraan pemerintahan) ke *governance*. Dalam hal ini terjadi perubahan interaksi dari kekuasaan dan kontrol menjadi pertukaran informasi, komunikasi dan persuasi dengan penyediaan informasi kepada masyarakat untuk dapat mengawal pemerintahan. Dalam mewujudkan tata kelola (*governant*), kepercayaan merupakan faktor penting. Ketika masyarakat semakin skeptis dengan pemerintahan, maka komunikasi pemerintahan yang berbasis kearifan lokal harus diperkuat untuk menjaga kepercayaan. Komunikasi berbasis kearifan lokal yang dilakukan oleh pemimpin daerah dapat membantu atau memberikan kontribusi untuk mempercepat penyelesaian masalah-masalah di daerah (Wardhani, 2012:10).

Komunikasi politik dengan berbasis kebudayaan lokal, atau kearifan lokal sewaktu peneliti mewawancarai Gusti Sultan Sepuh sangatlah terlihat meskipun beliau menyangkalnya. Yakni dengan memperlihatkan kebesaran-kebesaran dan kharisma Sultan dan orang-orang Keraton. Membanding-bandingkan Cirebon dengan Banten. Seperti menjanjikan kesejahteraan dan kemajuan ketika Cirebon kelak menjadi provinsi sendiri seperti Banten dan Yogyakarta. Inilah Komunikasi-komunikasi pencitraan politik berbasis kebudayaan atau kearifan lokal, dalam bahasa di dalam penelitian-penelitian sebelumnya

Tujuan Berpolitiknya Para Kaum Priyayi Cirebon

Gerry Van Klinken, mengatakan bahwa Kesultanan adalah “kelompok yang sedang istirahat” seperti digambarkan, barangkali telah menjadi simbol *part excellence* dari identitas daerah Indonesia dalam era otonomi. Ini adalah bagian dari kembalinya gerakan komunitarian dalam politik Indonesia setelah berakhirnya masa orde baru. Identitas sedang dibangkitkan kembali atau ditemukan lagi dengan berbagai cara, khususnya pada tingkat kabupaten. Bagi para peneliti hal ini mengejutkan sekaligus dilematis. Mengejutkan karena proses otonomi sudah lebih sering didiskusikan dalam memajukan syarat-syarat efisiensi administrasi modern dan demokrasi lokal. Para sultan tidak pernah diperhitungkan menjadi bagian dari persoalan-persoalan ini, tetapi ternyata mereka adalah bagian darinya (Van Klinken, 2010). Dalam bukunya yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “Adat Dalam Politik Indonesia”, Gerry menggambarkan bahwa sejumlah kesultanan sejak kemerdekaan NKRI,

menjadi tertidurkan untuk sementara. Setelah orde baru kesultanan-kesultanan ini mulai memunculkan kembali taringnya. Sejumlah raja termasuk Sultan Sepuh Cirebon (Kala itu masih berstatus sebagai Putra Mahkota), mulai menggiatkan semangat kekeratonan dalam tubuh kesultanan Cirebon. Dalam hal ini dituliskan oleh Gerry Van Klinken, “Jelas para sultan dekat dengan jantung kekuasaan ditingkat kabupaten dan kadang-kadang pula di provinsi. Contoh mengenai para sultan yang mengikuti sikap oposisi sangat jarang dan cenderung mendua sifatnya. Otonomi daerah telah mengangkat secara nyata kekuasaan para bupati dan gubernur. Beberapa dari sultan yang muncul kembali menginginkan posisi tersebut bagi dirinya, dengan mengambil inspirasi dari cerita sukses panjang Sultan Yogyakarta. Ada yang mengambil bentuk membantu salah satu kelompok yang mendukung calonnya menjadi bupati. Keraton dan sultan juga pernah menjadi titik fokus aktivisme yang bertujuan membentuk kabupaten atau provinsi baru (Van Klinken, 2010).

Ini sangatlah sama dengan hasil wawancara kami dengan berbagai tokoh wargi dalem keraton atau para bangsawan keraton Cirebon. Bahwa point kebenaran pertama adalah tentang peran sultan dan wagi priyayi keraton dalam proses demokrasi dan perpolitikan di dalam daerah. Ini sejak dahulu sudah terjadi walaupun kurang dianggap keberadaannya. Seperti ayah dari Pangeran Kamaludin dan kakeknya yang seorang sultan dan juga seorang pejabat kabupaten, dan yang lainnya. Tetapi gerakan ini akhir-akhir ini mulai menjamur dan menyebar secara sporadis. Gerakan berpolitik ini seperti dilakukan secara latah berjama'ah. Lalu point kedua yang harus di garis bawahi adalah keraton dan sultan membantu “calon atau kandidat pilihannya” untuk maju sebagai pejabat atau orang yang punya kuasa, untuk mewakili sultan dan keraton bila terpilih. Ini dilakukan agar kepentingan-kepentingan sultan dan keraton bisa diwujudkan oleh pemerintah daerah. Sultan seperti dalang yang memainkan wayang atau boneka politiknya yang dia bantu mencapai tahta jabatan, dan setelah mencapai itu si wayang yang juga adalah wargi dalem keraton (para Elang dan Raden), haruslah berbuat banyak untuk kepentingan Sultan dan Keraton. Ini juga sama seperti hasil wawancara dengan Drs.R.EB. Subagja, seorang Sejarawan Keraton, sepupu Sultan Sepuh, sekaligus Politisi Partai Demokrat. Dia mengatakan bahwa, “Sultan untuk saat ini belum mau untuk mencalonkan dirinya (berpolitik kembali), tapi dia mengirimkan wargi kepercayaannya (bangsawan-bangsawan keraton), untuk mencalonkan diri menjadi pejabat daerah dan lainnya, yang fungsinya adalah ketika mereka menjadi pejabat politik, hak-hak kepentingan keraton ini bisa diwakili. Karena yang berpolitik adalah orang-orang keraton sendiri, orang-orang kepercayaan sultan”. Ini senada dengan salah satu konsep dari teori dramaturgi, Goffman membagi kehidupan sosial ke dalam dua wilayah yaitu :

1. Wilayah depan (*front region*), yaitu tempat atau peristiwa sosial yang memungkinkan individu menampilkan peran formal atau bergaya layaknya aktor yang berperan. Wilayah ini disebut juga ‘panggung depan’ (*front stage*) yang ditonton khalayak.
2. Wilayah belakang (*back region*), yaitu tempat untuk mempersiapkan perannya di wilayah depan, disebut juga ‘panggung belakang’ (*back stage*) atau kamar rias, tempat pemain sandiwara bersantai mempersiapkan diri atau berlatih untuk memainkan perannya di panggung depan (Goffman dalam Mulyana, 2008:38).

Pada wilayah depan para pemain memiliki kesempatan untuk menciptakan image terhadap pertunjukannya yang skenarionya sudah diatur sedemikian rupa dan berbeda jauh dengan apa yang ada di wilayah belakang. Pada bagian lain penampilan individu secara teratur berfungsi secara umum dan tetap untuk mendefinisikan situasi bagi mereka yang menyaksikan penampilan itu, dikenal juga *setting* dan *personal front* untuk kemudian dibagi lagi menjadi penampilan (*appearance*) dan gaya (*manner*). Berdasarkan pandangan dramaturgis, seseorang cenderung mengetengahkan sosok-diri yang ideal sesuai dengan status perannya dalam kegiatan rutinnnya. Seseorang cenderung menyembunyikan fakta dan motif yang tidak sesuai dengan citra dirinya. Bagian dari sosok-diri yang di idealisasikan melahirkan kecenderungan si pelaku untuk memperkuat kesan bahwa pertunjukan rutin yang dilakukannya serta hubungan dengan penonton memiliki sesuatu yang istimewa sekaligus unik. Ketika politisi berinteraksi dengan sesama politisi lainnya atau dengan masyarakatnya, terjadi sebuah pengelolaan kesan oleh politisi yang diharapkan tumbuh dari orang lain terhadap politisi tersebut (misalnya agar politisi dianggap cerdas, berwibawa, berdedikasi, dan sebagainya). Akan tetapi dibelakang layar, perilaku mereka bisa sangat berbeda (Mulyana, 2008:39). Dalam fenomena politik di dalam tubuh keraton Cirebon ini, para bangsawan (para Elang, Pangeran, Raden, Ratu) yang berpolitik, berperan sebagai aktor yang berada di depan memainkan langsung peranan dalam pencitraan, dalam hal ini Goffman memberikan istilah (*front stage*) atau yang ditonton khalayak, sedangkan sultan berada dibelakang panggung untuk mempersiapkan dirinya, merias diri, merias orang-orang kepercayaannya, melatih orang-orang kepercayaannya dalam “berakting”, dan menggerakkan sikap politik mereka dari belakang panggung untuk memenuhi kepentingan-kepentingan keraton dan sultan jika mereka “berhasil didudukkan” di atas singgahsana kekuasaan daerah.

Point yang paling penting adalah point ketiga, yakni sultan dan keraton menjadi titik fokus aktivisme yang bertujuan membentuk kabupaten atau provinsi baru. Mengapa mereka giat sekali menghadiri bahkan menjadi tuan rumah panitia persiapan pembentukan provinsi Cirebon?, Jawabannya adalah karena ada kepentingan di dalam sini. Mereka para bangsawan keraton Cirebon seperti ingin kembali mengulang “romantisme zaman kerajaan”, dimana

mereka memegang hak kuasa, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Mereka bangsawan Cirebon dikatakan ingin mencapai kembali hak kuasa, seperti layaknya Hamengkubuwono di Yogyakarta, selain sebagai sultan beliau juga adalah seorang gubernur.

Mungkin setidaknya itulah yang ingin mereka perjuangkan. Pangeran Patih Anom Kamaludin ketika ditanya setuju jika suatu saat Cirebon direalisasikan menjadi sebuah provinsi baru, pejabat-pejabatnya haruslah dari kalangan keraton? Lantas diapun mengatakan dengan tegas, “setuju, karena itu haknya orang Cirebon (Maksudnya wargi dalem keraton). Kalau kita memberikan hak kita kepada orang-orang yang gak jelas, lalu di korupsi, siapa yang rugi? Kita sendiri kan. Kita ini orang-orang keraton, menawarkan pilihan lain dalam memilih para calon pejabat. Bagi yang sudah muak dengan orang-orang yang korup, ya silahkan pilih orang-orang keraton yang membawa nilai-nilai luhur budaya dan agama”, tandasnya penuh retorika.

Pandangan *Opinion Leader* Tentang Politik Para Priyayi

Ditulis oleh Gerry Van Klinken, bahwa, “saya tahu tidak ada jajak pendapat mengukur bagaimana masyarakat melihat sultan. Kebanyakan masyarakat daerah boleh jadi bersimpati. Mereka memandang para sultan sebagai simbol daerah mereka, tetapi bukan sebagai “raja kami” (Van Klinken, 2010:180). Paham ini muncul selaras dengan hilangnya kuasa politik para sultan dan bangsawan dalam kancah pemerintahan daerah. Dalam wawancara penulis dengan Camat Lemahwungkuk, dikatakan oleh ketua kecamatan tersebut, bahwa dia positif-positif saja dalam memandang para priyayi yang berpolitik. Menurutnya ada banyak juga priyayi Cirebon yang memang mumpuni dalam hal memimpin, dan yang sudah pasti adalah mereka bisa cepat dikenal oleh masyarakat, karena mereka adalah termasuk tokoh daerah, tandasnya. Tetapi ketika penulis tanyakan tentang setuju bila keningratan mereka, mereka gunakan sebagai alat pencitraan, lantas Camat Kecamatan Lemahwungkuk ini sedikit berpikir dan menjawab, “sebenarnya sih tidak masalah, jika kemudian setelah mereka terpilih menjadi pejabat mereka mau untuk mensejahterakan masyarakat, tetapi jika tujuannya adalah untuk kepentingan pribadi atau golongan, ya saya tidak setuju”. Senada dengan Ketua Kecamatan Lemahwungkuk, Ketua Bagian ekonomi dan sosial pembangunan kelurahan Kasepuhanpun mengatakan, “sebenarnya saya tidak setuju ketika keningratan mereka dibawa sebagai alat pencitraan, karena mereka seperti membedakan diri mereka dengan masyarakat. Padahal masyarakat tidak melihat gelar itu, tetapi dari sikap mereka.

Sebab dari merekapun Ada yang membaur dan ada yang tidak pada masyarakat. Dan kedua *opinion leader* di kota Cirebon inipun tidak menyetujui ketika Cirebon dibentuk menjadi sebuah provinsi, menurut Camat Lemah Wungkuk, Drs.M. Husni, masih ada daerah-daerah yang belum menyetujui pembentukan Provinsi Cirebon itu. Majalengka contohnya, dan ketika

banyak dari orang-orang yang menggiatkan komunikasi untuk mempercepat pembentukan Provinsi Cirebon yang diatasmamakan oleh masyarakat ini, lantas ada pertanyaan dari beliau yakni, rakyat yang mana, rakyat siapa?, menurut mereka berdua komunikator-komunikator politik yang menggeliatkan semangat pembentukan provinsi Cirebon ini, pastilah orang-orang yang memiliki kepentingan-kepentingan politik di balik ini semua.

Simbol kenengratan menurut Gerry Van Klinken, diterangkan dalam tulisannya. “Dalam hampir semua kasus kita berhadapan dengan simbol-simbol legitimasi kerajaan, dari pada dengan sebuah pergeseran kekuatan politik yang nyata terukur. Pihak-pihak yang membentuk opini publik di daerah biasa memanipulasi simbol-simbol ini dalam konteks otonomi daerah” (Van Klinken, 2010:168). Jelas dari jawaban para *opinion leader* sebagai perwakilan dari masyarakat berpendidikan tinggi, mereka kurang menyukai kenengratan sebagai alat pencitraan, karena ini seperti membentangkan jarak yang jauh antara masyarakat dengan calon pejabat dari kalangan bangsawan, dan yang dilihat oleh masyarakat pendidikan tinggi adalah sikap mereka kepada masyarakat. Mau mengayomi, mau menyapa, dan turun ke masyarakat tidak. Bukan dari gelar kenengratan mereka, meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada pula pemilih-pemilih tradisional dari kalangan abdi dalem, keturunan abdi dalem, dan masyarakat sekitar keraton yang masih benar-benar meninggikan posisi mereka para kaum priyayi wargi dalem keraton, atau para bangsawan kesultanan Cirebon, menurut Sultan Sepuh di dalam wawancaranya. Beliau berkata, “memang bisa juga disebut sebagai bentuk komunikasi pencitraan politik, karena masih banyak juga pemilih-pemilih tradisional, keturunan abdi dalem, dan warga sekitar keraton”.

Namun dalam kasus pandangan para *opinion leader* sebagai perwakilan masyarakat berpendidikan tinggi, pencitraan mereka ini tidak terlalu berpengaruh. Inilah salah satu warna dalam teori interaksionisme simbolik dan teori dramaturgis, bahwasannya bisa saja ketika kita memproyeksikan diri seperti keinginan khalayak (pencitraan), lewat simbol-simbol tertentu atau ketika kita mencoba “berakting” lewat drama politik menjadi “satria-satria piningit”, untuk masyarakat dalam hal ini masyarakat Kota dan Kabupaten Cirebon, kita bisa salah mempersepsikan keinginan masyarakat, atau bisa saja akting kita gagal. Dan kegagalan para politisi ini dialami ketika mereka “terlalu berlebihan” mengeksplor simbol kenengratan kepada masyarakat kaum terpelajar yang opininya diwakilkan oleh *opinion leader* mereka. Karena masyarakat Cirebon terpelajar tidak lagi terpengaruh oleh “akting kerajaan” para politisi bangsawan Cirebon lewat pencitraan kenengratannya. Mereka sudah lebih kritis dan cerdas dalam menentukan pemimpin mereka. Mereka bukan melihat lagi dari “siapa dia”, tetapi “apa bisanya” mereka.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian kami maka dapat diambil kesimpulan antara lain: Politisi dari kalangan bangsawan atau priyayi Cirebon melakukan pencitraan dengan memakai simbol-simbol keningratan keraton, ini sesuai dengan teori interaksionisme simbolik, yang membaca kehidupan sosial sebagai pertukaran simbol-simbol (Mulyana, 2008:35). Dan kaum bangsawan yang berpolitik ini menggunakan simbol-simbol keningratan keraton sebagai alat untuk pencitraan politik dan agar dianggap “tinggi” oleh masyarakat Cirebon. Tetapi cara semacam ini masih banyak berpengaruh pada pemilih tradisional (para abdi dalem, keturunannya, dan para warga atau masyarakat sekitar keraton), karena mereka pemilih tradisional masihlah menganggap tinggi para bangsawan keraton Cirebon. Ini sesuai dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkesimpulan bahwa, komunikasi pencitraan politik berbasis budaya, kearifan lokal akan cenderung berhasil (Sari, 2012), Setyanto (2012).

Bangsawan Cirebon sangat cerdas dalam berorasi dengan membawa simbol-simbol budaya. Seperti ketika Sultan Anom Pangeran Saladin mencalonkan diri sebagai walikota Cirebon, beliau sering sekali menggunakan jargon, “deklarasi kembali Kota Cirebon sebagai Kota Wali”. Kondisi ini sesuai dengan penelitian Jebarus (2011). Adik Sultan Anom, Pangeran Kamaludin, yang merupakan salah satu tim sukses kemenangan pasangan Sultan Saladin, dan Heru Nurcahyo beranggapan bahwa ketika masyarakat semakin skeptis dengan pemerintahan, maka komunikasi pemerintahan yang berbasis kearifan lokal harus diperkuat untuk menjaga kepercayaan. Hal ini sesuai dengan penelitian Wardhani (2013). Tetapi komunikasi pencitraan politik ini tidaklah terlalu berpengaruh pada masyarakat modern atau berpendidikan tinggi, karena mereka menganggap simbol-simbol kebangsawanan yang di bawa oleh para priyayi sebagai alat pencitraan ini malah menjadikan semacam jurang pemisah antara rakyat dan pemimpinnya, dan alasan kedua adalah karena masyarakat intelektual lebih melihat kepada sikap dan sifat calon pejabat yang akan mereka pilih, mereka mau turun dan merakyat atau tidak, bukan dari gelar kebangsawanannya.

Para bangsawan ini melakukan berbagai macam manuver politik dengan komunikasi pencitraan kepada masyarakat dalam meraih suara untuk mencalonkan diri sebagai ini dan itu, pertama adalah karena mereka ingin kembali memiliki hak kuasa dan politik di dalam wilayah yang dulunya mereka kuasai secara pemerintahan kerajaan, kedua mereka ingin merebut kembali semua hak-hak keraton yang di alihkan menjadi milik daerah, seperti tanah, dan lain-lain. Dan ketika sultan tidak aktif terjun langsung ke dalam kancah perpolitikan, bukan berarti sultan tidak berbuat apa-apa. Banyak sekali wargi-wargi dalem kepercayaan sultan yang ditugasi untuk berpolitik, tujuannya adalah ketika mereka terpilih menjabat sebagai pejabat pemerintahan mereka bertugas untuk mewakili kepentingan sultan dan kepentingan keraton.

Itulah sebabnya banyak sekali akhir-akhir ini kaum priyayi atau bangsawan keraton Cirebon yang berpolitik.

Ini senada dengan salah satu konsep dari teori dramaturgis, bahwasannya (Goffman dalam Mulyana, 2008:38), membagi dua peran para “aktor” di atas panggung, yang pertama adalah mereka yang berada di depan panggung sebagai orang yang langsung ditonton oleh khalayak (para politisi bangsawan yang langsung terjun ke dalam politik dan melakukan pencitraan), dan orang-orang yang berada dibelakang panggung sebagai perias, dan yang mempersiapkan para aktor untuk maju ke depan panggung (dalam hal ini sultan sebagai orang yang menjadi “dalang”, yang mengendalikan sikap politik para bangsawan Cirebon untuk memenuhi kepentingan keraton dan sultan ketika nantinya mereka berhasil terpilih menjabat).

Agar proses berpolitik dan berdemokrasi di dalam upaya pembangunan daerah Cirebon dapat tercapai dan nilai-nilai kebudayaan yang luhurpun dapat terjaga dan terlaksana maka disarankan untuk para politisi dari kalangan priyayi atau bangsawan keraton Cirebon, haruslah benar-benar mempersiapkan diri sebelum mencalonkan diri menjadi pejabat daerah atau negara. Jangan hanya mengandalkan derajat kebangsawanan yang di bawa sejak lahir, kemampuan dan kecakapan dalam memimpin haruslah di asah. Agar masyarakat bertambah percaya dan menghormati para kaum wargi dalem keraton dengan segala macam prestasi, kehebatan dan kebijaksanaannya dalam memimpin daerah. Untuk masyarakat Kabupaten dan Kota Cirebon, haruslah cerdas dalam memilih calon pejabat daerah. Jangan hanya memilih dari segi “keturunan”, tetapi haruslah diseimbangkan dengan faktor kecerdasan, kebijaksanaan, dll. Seperti empat pilar yang harus digenggam oleh setiap pemimpin, yakni shidiq (Jujur), amanah, tabligh (menyampaikan/terbuka), dan fathonah (Cerdas).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahira, Anne. "Sebuah Teori Budaya". Link Url: <http://www.aneahira.com/teori-budaya.htm>
(diakses pada tanggal 8 Mei 2012)
- Ahira, Anne. "Teori Kepemimpinan". Link Url: <http://www.aneahira.com/teori-kepemimpinan.htm> (diakses pada tanggal 28 Mei 2012)
- AP, Sumarno. 1989. Dimensi-dimensi komunikasi Politik. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arifin, Anwar. 2011. Komunikasi Politik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arifin, Anwar. 2006. Pencitraan dalam Politik. Jakarta: Pustaka Indonesia
- Atmonadi. "Cirebon". Link Url: <http://www.gragecirebon.wordpress.com> (diakses pada tanggal 30 Mei 2012)
- Berbasis Kearifan Lokal , 9, pp. 1-11.
- Corry Wardhani, Andy. 2012. Komunikasi Pemerintahan Daerah

- Dani. "Feodalisme". Link Url: <http://dani.blog.fisip.uns.ac.id/2011/09/16/feodalisme/#respond> (diakses pada tanggal 5 Juni)
- Davidson, Jamie S. And David Henley. 2007. *The Revival Of Tradition In Indonesian Politics (The Deployment Of Adat From Colonialism To Indigenism)*, 113, pp. 1-377.
- Debora idama, Felicia. 2010. *Strategi Komunikasi politik dalam perubahan image partai politik (studi kasus: partai politik PKS)*.
- Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kota Cirebon. "Sejarah Kota Cirebon". Link Url: <http://www.cirebonkota.go.id> (diakses pada tanggal 26 Mei 2012)
- Furchan, A. 2004. *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jebarus, Felix. 2012. *Komunikasi Politik Soekarno: Membangun Dukungan Publik Dengan Pendekatan Budaya*, 13, pp. 1-14.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Liliweri, Alo. 2007. *Makna Budaya Dalam Komunikasi Antar Budaya*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.
- Lim, Lawrence and Jill Gocher. 1990. *The Times Travel Library (Cirebon Edition)*, 23, pp. 1-95.
- Littlejohn, Stephen W and Karen A Foss. 2009. *Terjemahan Teori Komunikasi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Loisa, Riris dan Yugih Setyanto. 2011. *Mencari Bentuk Kampanye Politik Khas Indonesia: Pencitraan Berbasis Dimensi Budaya*, 12, pp. 1-13.
- M. Romli, Asep Syamsul. "Communication Skill". Link Url:
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mujiyanto, Yan.dkk. 2010. *Pengantar Ilmu Budaya*. Yogyakarta: Pelangi Publishing.
- Mulyana, Deddy. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mulyana, Deddy. 2008. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nairiyah, Putri "Kebudayaan". Link Url: <http://putrinairiyah.blogspot.com/2012/07/dampak-perkembangan-kebudayaan-terhadap.html> (diakses pada tanggal 7 Mei 2012)
- Nimmo, Dan. 2000. *Komunikasi Politik (Komunikator, Pesan, dan Media)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurudin. 2000. *Sistem Komunikasi Indonesia*. Yogyakarta : BIGRAF Publishing.
- Palaloi, Hamzah. "Pencitraan Politik". Link Url: [http://pondokhamzah.blogspot.com/2010/01/pencitraan politik.html](http://pondokhamzah.blogspot.com/2010/01/pencitraan-politik.html) (diakses pada tanggal 12 Mei 2012)

- Sari, Afrina. 2012. Komunikasi Politik Dan Diplomasi Berbasis Kearifan Lokal (Analisis Pilkada Dalam Proses Kampanye Politik), 18, pp. 1-18.
- Setyaningsih, Wahyu. "Review Buku: Teori Budaya". Link Url: <http://sosbud.kompasiana.com/2012/12/29/review-buku-teori-budaya-519684.html> (diakses pada tanggal 8 Mei 2012)
- Sukmadinata. 2006. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Van Klinken, Gerry. 2010. Adat Dalam Politik Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Varma, S.P. 1995. Teori Politik Modern. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wiryanto. 2000. Teori Komunikasi Massa. Jakarta: PT. Grasindo.
- www.romeltea.wordpress.com (diakses pada tanggal 21 Oktober 2007 18: 25: 02 GMT)